

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Belakangan ini tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung melambat yang memiliki dampak menurunnya penerimaan pajak dan ketersediaan likuiditas dalam negeri berkurang. Padahal ketersediaan likuiditas tersebut sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bukan rahasia lagi kalau banyaknya harta warga Negara Indonesia yang disimpan maupun di investasikan di luar negeri. Padahal seandainya harta tersebut di simpan dan di investasikan di Indonesia tentu akan meningkatkan likuiditas dalam negeri dan memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi. Likuiditas Negara dapat ditingkatkan salah satu caranya dengan menerapkan pajak.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan, merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut PJA. Andriani Pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan, yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak.

Pada saat ini pemerintah telah melakukan sosialisasi mengenai tata cara pembayaran pajak yang sangat mudah di era *economic digital* pada saat ini. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui website yang dimiliki Direktorat Dirjen Pajak sehingga tidak ada alasan lagi untuk wajib pajak orang pribadi tidak melaporkan SPT yang dimilikinya, namun masih banyak juga orang yang lebih memilih untuk membayar pajak dengan mendatangi kantor pelayanan pajak terdekat.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak harus didukung pula oleh motivasi yang sangat kuat dari diri masing-masing wajib pajak. Menurut Caroko (2015) motivasi wajib pajak merupakan daya dorong yang ada pada wajib pajak secara eksternal dan internal untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri hingga membayarkan pajak terutang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) mengemukakan hasil bahwa motivasi wajib pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan. Namun hasil yang berbeda diperoleh Ginting, dkk (2017) yang menemukan bahwa motivasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak sendiri tidak luput dari seberapa tinggi sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar atau tidak melaporkan SPT.

Menurut Mardiasmo (2009:57) Sanksi merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan, perundang-undangan, perpajakan akan dituruti, ditaati atau dipatuhi. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak berguna untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah diharapkan akan membuat para wajib pajak taat

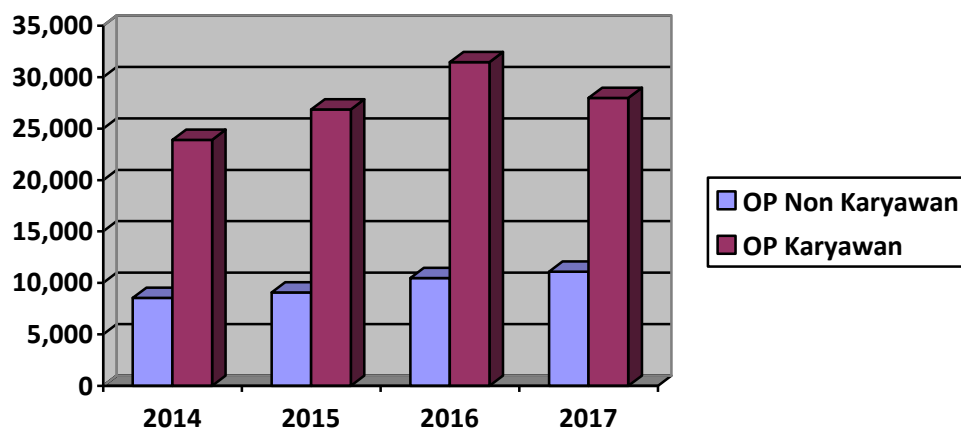
dan patuh dalam kepatuhan membayar pajak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ngadiman (2015) yang menemukan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andinata (2015) yang menyatakan hasil bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak serta penelitian yang dilakukan oleh Amanda, dkk (2014) yang menunjukkan hasil bahwa penerapan sanksi pajak yang ditegaskan belum mampu mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diartikan bahwa seberapa berat sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo termasuk di bawah lingkup wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. KPP Pratama memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak dibidang wajib pajak penghasilan, pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah.

Kantor pelayanan pajak Surabaya Mulyorejo mempunyai wajib pajak terdaftar wajib SPT yakni tahun 2014 sebesar OP Non karyawan 11,949, OP karyawan 40,524. Tahun 2015 sebesar OP Non karyawan 9,227 OP Karyawan sebesar 38,989. Tahun 2016 OP non Karyawan yang wajib SPT sebesar 8,472 dan OP Karyawan sebesar 43,186 dan di tahun 2017 OP Norkaryawan yang wajib SPT sebesar 6,101 dan OP Karyawan Sebesar 37,094.

Berikut ini realisasi yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT:

Grafik 1.1
Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Surabaya
Mulyorejo



Sumber: Pengolahan Data dan Informasi KPP Surabaya Mulyorejo

Grafik diatas, menunjukkan hasil wajib pajak orang pribadi (OP Non Karyawan dan OP Karyawan) yang melaporkan SPT. Tahun 2014 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT sebesar, 52,473 sedangkan yang melaporkan SPTnya 32,463. Tahun 2015 WPOP yang terdaftar sebesar 48,216 dan yang melaporkan SPT 35.906. Tahun 2016 WPOP yang terdaftar sebesar 51,658 dan yang melaporkan sebesar 41,932. Tahun 2017 WPOP yang mendaftar sebesar 43,195 dan yang melaporkan sebesar 39,049.

Berdasarkan uraian diatas, membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah, hal ini kemungkinan disebabkan oleh

kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kurang dipahami dan wajib pajak takut sanksi yang akan diberikan akan memberatkan.

Permasalahan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo diantaranya adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak.

Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang diteliti. Variabel independen dalam penelitian ini adalah factor eksternal yang diukur dengan dimensi: Sanksi Pajak sebagai variable independen, dan Variable dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian juga menggunakan motivasi membayar pajak sebagai moderator hubungan tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dimungkinkan untuk menguji aspek psikologis wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

Fokus penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin meneliti seberapa tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Surabaya Mulyorejo dalam membayar pajak didasarkan factor sanksi pajak atau factor motivasi yang memang ada didalam diri wajib pajak tersebut.

Berdasarkan berbagai kondisi dan keadaan seperti diuraikan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap topik ini, dengan harapan dapat ikut memberikan sumbangan pemikiran dalam memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya, juga dalam memecahkan berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan pajak, serta ingin meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang

yang berlaku. Seberapa jauh pelaksanaan dimaksud, penulis mencoba menelitinya dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Motivasi Membayar Pajak Sebagai Variabel Moderasi”(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada analisis tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dibatasi dengan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo

. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data primer, variabel dalam penelitian ini adalah sanksi pajak dan motivasi membayar pajak sebagai variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo?
2. Apakah sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo dengan motivasi membayar pajak sebagai variable moderasi?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo dengan motivasi membayar pajak sebagai variable moderasi.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang sanksi pajak terlebih terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Surabaya.

b. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian mendalam terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bagi wajib pajak di Surabaya.

2. Manfaat Teoritis

Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap bidang keilmuan akuntansi pajak, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan akuntansi.